

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TUGAS AKHIR

**MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

pada Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu

Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

HESTIKA PUTRI

NIM: 02170624135



PROGRAM STUDI D-III ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

TAHUN 2024



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamiyah UIN Sultan Syarif Kasim Riau

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

: HESTIKA PUTRI
 : 02170624135
 : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
 : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 : MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA
 BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Pekanbaru, 13 Juni 2024

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING

Fatimah Zuhra, S. Si M. Stat
 NIP. 19880718 202012 2 018

MENGETAHUI

KETUA PRODI

Dr. Jhon Afrizal, S.HI. MA
 NIP.19790911 201101 1 003

Nama

Nim

Program Studi

Fakultas

Judul Tugas Akhir

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan buku, atau untuk keperluan lain.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun.



DEKAN

Dr. Hi. Mulyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : HESTIKA PUTRI
NIM : 02170624135
PROGRAM STUDI : D3 ADMINISTRASI PERPAJAKAN
FAKULTAS : EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
SEMESTER : VI (ENAM)
JUDUL : MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
TANGGAL UJIAN : 13 JUNI 2024

Tim Penguji

Ketua

Dr. Jhon Afrizal, S.Hi, MA
NIP. 19790911 201101 1 003

Sekretaris

Candra Jon Asmara, S.Sos, M.Si
NIP. 19760104 202321 1 001

Penguji I

Sahwitri Triandani, SE, M. Si
NIP. 19820806 200604 2 002

Penguji II

Abdiana Ilosa, S.AP, M.PA
NIP. 19870716 201503 2 003

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Surat : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Hestika Putri
 Nim : 021 7062 4135
 Tempat/Tanggal Lahir : Lareh nan panjang / 06 November 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Prodi : D-III Administrasi Perpajakan

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya":

Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya) saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.



Jaru, 28 Juli 2024
 membuat pernyataan

Hestika Putri

NIM : 021 7062 4135

**pilih salah satu sesuai jenis karya tulis*



ABSTRAK

MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

OLEH

HESTIKA PUTRI

NIM: 02170624135

Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air permukaan. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan pada bulan Mei 2024 di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, dokumentasi dan wawancara langsung dengan staff bidang Pajak Daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan di Tingkat Provinsi, khususnya di Sumatera Barat. Namun dalam praktiknya, proses pemungutan pajak yang dilakukan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kendala administrasi, pengawasan yang kurang efektif, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal.

Kata kunci: *Mekanisme pemungutan, Pajak Air Permukaan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Puji syukur kehadirat Allah Subbhanallahu wa ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat”**. Penyusunan Tugas Akhir ini merupakan salah satu syarat akademik untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sholawat beserta salam penulis panjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia serta yang selalu kita nanti syafaatnya di dunia dan di *yaumul qiyamah* nanti. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik karena adanya bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih sebesar-besarnya kepada yang teristimewa kedua orang tua penulis, ayahanda Zaldi Arman dan ibunda Nurlinas, mustahil penulis mampu melewati semua permasalahan yang penulis alami selama proses perkuliahan ini jika tanpa do'a, rido dan dukungan dari beliau, yang telah memperjuangkan kebahagiaan penulis dalam kondisi apapun dan mereka menjadi motivasi terbesar disetiap hal yang penulis jalani. Penulis juga sangat berterima kasih kepada :

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 2. Ibu Dr. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 3. Bapak Dr. Kamaruddin, S. Sos, M. Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 4. Bapak Dr. Mahmuzar, M. Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 5. Ibu Dr. Hj. Julina, SE, M. Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 6. Bapak Jhon Afrizal, S. Hi, MA selaku Ketua Program Studi D-III Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 7. Ibu Fatimah Zuhra, S. Si, M. Stat selaku Dosen Pembimbing yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan masukan dan saran yang berharga dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
 8. Bapak Muhammad April, SH, M. HUM selaku Pembimbing Akademik selama penulis menempuh Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 9. Bapak Maswar Dedi, AP, M. Si, selaku Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dan staff yang telah membantu dalam proses pengumpulan data untuk penulisan Tugas Akhir ini



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
10. Kepada seluruh Dosen D-III Administrasi Perpajakan yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama kurang lebih 3 (tiga) tahun perkuliahan
 11. Kepada saudara penulis, Afdika Nursal A. Md dan Suryadi Irvan terima kasih karena telah memberikan motivasi, dorongan serta selalu mendo'akan dan memperjuangkan untuk kebaikan cita-cita penulis
 12. Dan seluruh pihak beserta rekan-rekan Mahasiswa pada Program Studi D-III Administrasi Perpajakan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini

Semoga dengan adanya arahan dan bimbingan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi amal baik dan di ridhoi Allah SWT. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun serta bermanfaat dalam melengkapi dan menyempurnakan langkah selanjutnya demi hasil yang lebih baik lagi, semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 4 Juni 2024

Penulis

HESTIKA PUTRI
NIM. 02170624135

- Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian	12
1.4 Manfaat Penelitian	13
1.5 Metode Penelitian	14
1.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	14
1.5.2 Desain Penelitian.....	14
1.5.3 Jenis Data.....	14
1.5.4 Metode Pengumpulan Data	15
1.5.5 Analisis Data	16
1.6 Sistematika Penulisan	16
BAB II GAMBARAN UMUM	18
2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	18
2.2 Struktur Organisasi Kantor Bapenda Sumatera Barat	20
2.3 Uraian Tugas Bagian Unit Kerja BAPENDA Provinsi Sumatera Barat	23
2.3.1 Kepala Badan.....	23
2.3.2 Sekretariat.....	23
2.3.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.....	24
2.3.4 Sub Bagian Keuangan dan Program.....	24
2.3.5 Bidang Pajak Daerah.....	24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.6	Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	25
2.3.7	Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya	26
2.3.8	Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah.....	26
2.3.9	Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain.....	27
2.3.10	Sub Bidang Retribusi Daerah.....	27
2.3.11	Sub Bidang Bagi Hasil Pajak	28
2.3.12	Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain	28
2.3.13	Bidang Pembinaan dan Pengendalian	29
2.3.14	Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan	30
2.3.15	Sub Bidang Hukum dan Perundangan-Undangan	30
2.3.16	Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja.....	31
2.4	Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	31
BAB III	TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK.....	33
3.1	Tinjauan Teori.....	33
3.1.1	Pengertian Pajak.....	33
3.1.2	Fungsi Pajak.....	34
3.1.3	Asas Pemungutan Pajak	35
3.1.4	Pengelompokan Pajak.....	37
3.1.5	Sistem Pemungutan Pajak.....	39
3.1.6	Pendapatan Asli Daerah	40
3.1.7	Pajak Daerah	41
3.1.8	Pajak Air Permukaan.....	42
3.1.9	Dasar Hukum Pajak Air Permukaan.....	43
3.1.10	Objek Pajak Air Permukaan	43
3.1.11	Subjek dan Wajib Pajak Air Permukaan	44
3.1.12	Dasar Pengenaan Pajak Air Permukaan	44



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.1.13 Tarif dan Cara Perhitungan Pajak Air Permukaan	46
3.1.14 Tata Cara Pemungutan dan Pelaporan Pajak Air Permukaan	47
3.1.15 Denda Pajak Air Permukaan	48
3.1.16 Pengertian Mekanisme.....	48
3.1.17 Pajak Menurut Islam	48
3.2 Tinjauan Praktek	53
3.2.1 Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	53
3.2.2 Perbandingan Antara Teori dan Praktek Dalam Pemungutan Pajak Air Permukaan	69
BAB IV PENUTUP	71
4.1 Kesimpulan.....	71
4.2 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN	
PEDOMAN WAWANCARA	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat..	3
Tabel 1.2	Nama-Nama UPTD PPD per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat	4
Tabel 1.3	Daftar Wajib Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Barat	5
Tabel 3.1	Rentang minimum dan maksimum harga dasar air permukaan sumaterabarat.....	58
Tabel 3.2	Faktor Ekonomi Wilayah.....	59
Tabel 3.3	Koefisien Jenis Sumber Air	60
Tabel 3.4	Koefisien Lokasi Sumber Air Permukaan	60
Tabel 3.5	Koefisien Luas Areal Pengambilan Air Permukaan	61
Tabel 3.6	Koefisien Volume Air yang diambil.....	61
Tabel 3.7	Koefisien Kualitas Air	62
Tabel 3.8	Koefisien Kondisi Daerah Aliran Sungai	62
Tabel 3.9	Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Air.....	63
Tabel 3.10	Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan.....	64
Tabel 3.11	Perbandingan Tinjauan Teori dan Tinjauan Praktek Pajak Air Permukaan.....	69

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat	22
Gambar 3.1	Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.....	53



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang dengan banyak melakukan pembangunan di semua aspek. Dalam keberhasilan pembangunan nasional tentu bukan tugas yang mudah, dikarenakan setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, jumlah penduduk, adat istiadat dan sumber daya yang berbeda-beda di setiap daerahnya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan wewenang bagi setiap daerahnya dengan tujuan terciptanya kemandirian daerah atau dikenal dengan otonomi daerah. Salah satu cara untuk mensukseskan pembangunan nasional adalah pengembangan fasilitas yang dapat untuk mempermudah rakyat.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk memungkinkan kesejahteraan rakyat baik materi maupun spiritual. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu Bangsa dan Negara dalam pembiayaan pembangunan dengan menggali sumber dana yang berasal dari negeri, yaitu pajak.

Salah satu upaya pemerintah daerah adalah menyerap dana dari Pendapatan Asli Daerah, yang terdiri dari Pajak dan Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah dan lain-lain dari Pendapatan Asli Daerah yang sah karena bermanfaat dalam meningkatkan kemampuan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan juga mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah. Semakin



tinggi PAD maka semakin tinggi pula kemampuan pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah telah berhasil menyelenggarakan otonomi daerah. Demikian sebaliknya, jika PAD yang didapat pemerintah daerah semakin sedikit atau mengalami penurunan, maka penyelenggaraan otonomi daerah belum maksimal.

Pajak adalah salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam melaksanakan Pembangunan Nasional dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Mendengar kata pajak, kebanyakan dari kita mengamsumsikan sebagai suatu beban tambahan yang cukup signifikan di tengah belitan kesulitan ekonomi yang semakin berat dari waktu ke waktu. Dikarenakan kurangnya pemahaman tentang pajak itu sendiri.

Kesadaran akan pajak memang perlu ditingkatkan, tetapi harus dilakukan dengan cara yang bijaksana sehingga masyarakat tidak menjadi anti pati terhadap pajak. Berdasarkan pemungutannya pajak di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak ditetapkan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama, khususnya melalui pajak daerah. Dengan diberlakukannya Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Salah satu jenis penerimaan pajak daerah diantaranya diperoleh melalui pajak air permukaan. Pajak air permukaan adalah pajak atas pengambilan atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat di permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik di laut maupun di darat. Pajak air

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

permukaan merupakan salah satu instrumen kebijakan oleh pemerintah daerah untuk memperoleh pendapatan yang diperlukan dalam mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Pada khususnya, Provinsi Sumatera Barat memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, termasuk sumber daya air permukaan yang strategis untuk berbagai sektor, seperti pertanian, industri, perusahaan dan domestik. Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Sumatera Barat bertanggung jawab atas pengelolaan dan pemungutan pajak, termasuk Pajak Air Permukaan tersebut.

Namun dalam praktiknya, proses pemungutan pajak yang dilakukan sering kali dihadapkan pada berbagai tantangan seperti kendala administrasi, pengawasan yang kurang efektif, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal, disebabkan kurangnya kesadaran perusahaan yang memakai air permukaan tersebut. Hal ini menyebabkan kelamahan-kelamahan dalam melakukan pendataan oleh petugas pemungutan pajak air permukaan (PAP), dikarenakan ketidaktahuan petugas dalam pendataan pajak air permukaan.

Adapun target dan realisasi Pajak Air permukaan adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Air Permukaan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

No	Tahun	Target	Realisasi
1.	2021	9.050.540.000,00	8.939.459.040,00
2.	2022	9.051.451.797,00	8.269.460.992,00
3.	2023	13.831.551.000,00	10.884.874.063,00

Sumber: kantor badan pendapatan daerah provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024

Pada tabel 1.1 dapat dilihat bahwa target PAP pada tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami peningkatan dan realisasinya mengalami penurunan sebesar Rp. 8.269.460.992,00. Sedangkan pada tahun 2023 menjadi angka tertinggi target dan

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



realisasi pajak air permukaan pada badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Dapat diketahui bahwasanya setiap wajib pajak/badan yang melakukan pengambilan atau pemanfaatan air permukaan, harus melaporkan data volume pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan kepada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPTD PPD) yang terdaftar di Provinsi Sumatera Barat. Berikut nama-nama UPTD PPD per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1. 2

Nama-Nama UPTD PPD per Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat

No	Nama UPTD PPD	Kabupaten/Kota
1.	Kantor Pusat	Kota Padang
2.	UPTD Padang	Kota Padang
3.	UPTD Bukittinggi	Kota Bukittinggi
4.	UPTD Payakumbuh	Kota Payakumbuh
5.	UPTD Batusangkar	Kabupaten Tanah Datar
6.	UPTD Solok	Kota Solok
7.	UPTD Pariaman	Kota Pariaman
8.	UPTD Sijunjung	Kabupaten Sijunjung
9.	UPTD Lubuk Sikaping	Kabupaten Pasaman
10.	UPTD Painan	Kabupaten Pesisir Selatan
11.	UPTD Padang Panjang	Kota Padang Panjang
12.	UPTD Lubuk Basung	Kabupaten Agam
13.	UPTD Sawahlunto	Kota Sawah Lunto
14.	UPTD Padang Aro	Kabupaten Solok Selatan
15.	UPTD Pulau Punjung	Kabupaten Dharmasraya
16.	UPTD Simpang Ampek	Kabupaten Pasaman Barat
17.	UPTD Arosuka	Kabupaten Solok
18.	UPTD Sarilamak	Kabupaten Lima Puluh Kota

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024

Pada tabel 1.2 di atas terdaftar 18 nama-nama UPTD PPD per Kabupaten/Kota di Bapenda Provinsi Sumatera Barat yang melapor Pajak Air Permukaan dengan jenis usaha yang berbeda-beda seperti, Perusahaan, Rumah

Makan, Hotel, Waterpark, PDAM, Wirausaha, Pencucian Mobil dan lain sebagainya.

Tabel 1. 3
Daftar Wajib Pajak Air Permukaan Provinsi Sumatera Barat

NO.	NAMA PERUSAHAAN	ALAMAT/LOKASI	JENIS USAHA
PT.PLN (Persero)			
1	PLTA Batang Agam	Kabupaten Agam	Listrik (Tenaga Air)
2	PLTA Maninjau	Kabupaten Agam	Listrik (Tenaga Air)
3	PLTA Singkarak	Kabupaten Tanah Datar	Listrik (Tenaga Air)
4	PLTU Ombilin	Jl. M Yamin Desa Sijantang Kec. Talawi Kota Sawahlunto	Listrik (Tenaga Uap)
PLTM			
1	PT. Pesisir Hidro Energi (PLTM Guntung)	Palupuah	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
2	PT. Waskita Sangir Energi (PLTM Sangir Hulu)	Teluk Air/Sangir	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
3	PT. Selo Kencana Energi (PLTM Lubuk Gadang)	Teluk Air/Sangir	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
4	PT. Supraco Mitra Energi (PLTM Gumanti)	Solok	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
5	PT. Pelita Prima Nusantara (PLTM Mangani)	Sarilamak	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
6	PT. Dempo Sumber Energi (PLTM Pelangai)	Jl. Sumatera No. 81 Kota Padang	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
7	PT. Bajradika Rangkiang Energi (PLTM Lubuk Sao)	Jorong Lubuk Sao Nagari Tanjung Raya Kab. Agam	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
8	PT. Anggrek Mekar Sari	Jl. TB. Simatupang Jakarta	Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTM)
PADANG			
1	PDAM Kota Padang	Jl. H. Agus Salim Kec. Padang Timur	BUMD

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2	PT. Semen Padang	Jl. Raya Indarung Padang Kec. Lubuk Kilangan	Industri
3	PT. Wira Innomas	Jl. Dumai No.1 Kec. Padang Selatan	Industri
4	PT. Family Raya	Jl. Gurun Laweh Nan XX Kec. Lubuk Begalung	Industri
5	PT. Teluk Luas	Jl. Raya By Pass Padang Kec. Lubuk Begalung	Industri
6	PT. Lembah Krya	Jl. Belakang Simpang Haru No. 1 Kec. Padang Timur	Industri
7	PT. Kilang Lima Gunung	Jl. Banuaran No. 24 Kec. Lubuk Begalung	Industri
8	PT. Batanghari Barisan	Jl. Raya By Pass Padang Kec. Lubuk Begalung	Industri
9	PT. Lembah Karet	Jl. Raya By Pass Padang KM. 22 Kec. Koto Tangah	Industri
10	CV. Harapan Indah	Jl. Air Dingin Kec. Koto Tangah	Industri
BUKITTINGGI			
1	PDAM Tirta Jam Gadang	Jl. Panorama No. 3 Kec. Guguk Panjang	BUMD
2	Pemandian Sikabu	Jl. Sikabu Kec. IV Koto Agam	Pemandian
3	Singgalang	Jl. Dr. Hamka No. 33 Kec. Guguk Panjang	Isi Ulang Depot Air
4	Kapatoman	Jorong Jambak Nagari Sianok Anam Suku Agam	Restoran
PAYAKUMBUH			
1	PDAM Tirta Sago	Jl. Muhammad Yamin No. 21 Kec. Payakumbuh Timur	BUMD
2	Pemandian Alam Bt. Tabik	Batang Tabik Sungai Kamunyang Kecamatan Luhak Kabupaten Limapuluh Kota	Pemandian
3	Pencucian Surya Utama Afrizal	Jl. Khatib Sulaiman Kec. Payakumbuh Selatan	Pencucian Kendaraan
4	Pencucian SKS Rasydin	Jl. Muhammad Yamin Kec. Payakumbuh Timur	Pencucian Kendaraan
5	Pencucian Abdul Muis	Kel. Limbukan, Kec. Payakumbuh Selatan	Pencucian Kendaraan
BATUSANGKAR			
1	PDAM Tirta Alami	Kubu Rajo Kec. V Kaum	BUMD
2	Cucian Budi Motor	A. Yani Batusangkar Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
3	Cucian Tunas Utama	Kiambang, Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
4	Cucian Sei, Tarab	Pasar Sei. Tarab Kec. Sei Tarab	Pencucian Kendaraan

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

5	Cucian Parak Bagak	Koto Panjang Kec. Sei. Tarab	Pencucian Kendaraan
6	Cucian Biru Motor	A. Yani Batusangkar Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
7	Cucian Tabek	Tabek Kec. Pariangan	Pencucian Kendaraan
8	Rumah Makan Sari Budaya	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
9	Rumah Makan Angin Santai	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
10	Rumah Makan Surya Indah	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
11	Rumah Makan Angin Berhembus	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
12	Cucian Kiambang	Kiambang Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
13	Rumah Makan Tj. Indah	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
14	Cucian Tursima	Dobok Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
15	Cucian Rahmat	Balai Labuah Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
16	RM Bustami / Tapian Danau	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
17	Cucian Pangeran	Kubu Rajo Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
18	Cucian Kentang	Tabek Kec. Pariangan	Pencucian Kendaraan
19	RM Pergaulan / Tandau	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
20	Cucian Arfentius	Ombilin Kec. Rambatan	Pencucian Kendaraan
21	Cucian Yasmawati	Ombilin Kec. Rambatan	Pencucian Kendaraan
22	Rumah Makan Angin Danau	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
23	Faiz Steam Station	Dobok Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
24	Cucian Yoga	Panti Kec. Rambatan	Pencucian Kendaraan
25	Cucian Oyon	Kubu Rajo Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
26	Cucian Pen	Simabua Kec. Pariangan	Pencucian Kendaraan
27	Cucian Gajah Mada	Sijangek Kec. Sei. Tarab	Pencucian Kendaraan
28	Cucian Ardi	Malana Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
29	Cucian Okcer	Tj. Barulak Kec. Tj. Emas	Pencucian Kendaraan
30	Cucian Erman	Supayang Kec. Salimpaung	Pencucian Kendaraan
31	Cucian Os	Cubadak Kec. V Kaum	Pencucian Kendaraan
32	CV. Lubuk Batung	Gudam Kec. Pagaruyung	Pabrik Paralon
33	Rumah Makan Dangau Barangin	Sijangek Kec. Sei. Tarab	Rumah Makan
34	Pondok Flora	Sijangek Kec. Sei. Tarab	Rumah Makan
35	Rumah Makan Aie Tanang	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
36	Talago Sangko	Ombilin Kec. Rambatan	Rumah Makan
37	Langkok Resort	Rambatan	Rumah Makan
38	Hotel Jayakarta	Ombilin Kec. Rambatan	Hotel

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

39	RM. Pincuran Gadang	Ombilin Rambatan	Rumah Makan
40	Cucian Taruko Auto	Tj. Emas Kec. Tanjung Emas	Pencucian Kendaraan
41	Amia	Simpang Kiambang Kec. V Kaum	Air Minum Kemasan
42	Tobek Laweh	Silabuak Kec. V Kaum	Taman Hiburan
43	Cooki Water Park	Sei Tarab Kec Sei Tarab	Taman Hiburan
44	D Tanang Park	Rambatan	Taman Hiburan
45	Nova Water Park	Sei Tarab Kec Sei Tarab	Taman Hiburan
SOLOK			
1	PDAM Kota Solok	Jl. Cindua Mato No. 21 Kec. Tj. Harapan	BUMD
2	JANIZAR CAN (PABRIK TAHU)	Jl. Sersan Basir Tanah Garam Kec.Lubuk Sikarah	Pabrik Tahu
PARIAMAN			
1	PDAM Kab. Pariaman	JL. Jambak Ketaping Lubuk Alung	BUMD
2	PT. Bumi Sarimas Indonesia	JL. Raya Padang Bukittinggi KM 21 Duku Kasang Batang Anai	Industri
3	PT. Andalas Anai Permai Internasional	Kandang Ampek Guguk, Kec. 2X11 Kayu Tanam	Taman Hiburan
4	PT. Andalas Anai Permai Internasional 2	Kandang Ampek Guguk, Kec. 2X11 Kayu Tanam	Taman Hiburan
SIJUNJUNG			
1	PDAM Tirta Sanjung Buana	Muaro Sijunjung	BUMD
2	Pink Hotel	Jl. Lintas Sumatera Kec. Kamang Baru	Industri Niaga
3	Dewi Cucian	Muaro Gambok Kec. Sijunjung	Pencucian Kendaraan
4	Surya Pencucian	Muaro Gambok Kec. Sijunjung	Pencucian Kendaraan
5	KM. 61 Service Station	Jl. Lintas Sumatera Kec. Tanjung Gadang	Pencucian Kendaraan
6	Kemilau Permata Sawit	Muaro Tajung Kec. Kamang Baru	Industri Niaga
7	Ferly Pencucian	Guguk Dadok Sijunjung	Pencucian Kendaraan
LUBUK SIKAPING			
1	PDAM Tirta Saiyo	Jl. Puti Sangkar Bulan No. 12 Lb Sikaping	BUMD
PAINAN			
1	PDAM Tirta Langkisau	Jl. Perintis Kemerdekaan Painan Timur Kec IV Jurai	BUMD
2	CV. Pincuran Boga	Jalan Pincuran Boga Painan Selatan Kec.IV Jurai	Industri Niaga
3	PT. Inkasi Raya	Muaro Sakai Kec. Pancung Sakai	Industri Niaga
4	PT. Kemilau Permata Sawit	Jl. Lintas Padang-Bengkulu Kec. Ranah Ampek Hulu Tapan	Industri Niaga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5	PT. Sumatera Jaya Argo Lestari	Lunang Silaut Kec. Lunang	Industri Niaga
6	PT. Transco Energi Utama	Jl. Diponegoro No.7 Kota Padang	Industri Niaga
7	PT. Muara Sawit Lestari	Nagari Lunang Silaut, Kec. Lunang	Industri Niaga
PADANG PANJANG			
1	PDAM Kota Padang Panjang	Jl. M. Yamin No. 2 Kec. Padang Panjang Barat	BUMD
2	PT. Minangkabau Fantasi	Jl. St. Syahrir Perkampungan Minangkabau Village	Taman Hiburan
LUBUK BASUNG			
1	PDAM Kabupaten Agam	Jl. Dr. Mohammad Hatta No.531 Lubuk Basung Kab. Agam	BUMD
2	PT. Mutiara Agam	Nagari Tiku V Jorong Kec. Tanjung Mutiara Kab. Agam	Industri Niaga
3	PT. AMP Plantation	Jorong Tapian Kandis Nag. Salareh Aia Kec. Palembang Kab.	Industri Niaga
4	PT. Perkebunan Pelalu Raya	Padang Tarok Jr. Kt Gadang Salareh Aia Kec. Palembang Kab.	Pengolahan Kelapa Sawit
5	PT. Bukit Sawit Semesta	Manggopoh Kec. Lubuk Basung	Industri Niaga
SAWAHLUNTO			
1	PDAM Kota Sawahlunto	Jl. Asimin Kayu Gadang Desa Kec. Barangin Kota Sawahlunto	BUMD
2	PT. Wahana Wisata Sawahlunto	Jl. Lintas Sumatera Muara Kalaban Kec. Silungkang Kota Sawahlu	Taman Hiburan
3	PT. Bukit Asam Unit Pertambangan Ombilin	Manan Jatin Kec. Barangin Kota Sawahlunto	Pertambangan
4	FA. Taltex Silungkang	Silungkang Tigo Kec. Silungkang Kota Sawahlunto	Industri Niaga
SOLOK SELATAN			
1	PDAM Solok Selatan	Jl. Raya Pasir Talang Muara Labuh	BUMD
2	PT. Supreme Energi	Jl. Raya Muara Labuh - Padang Aro KM 17	Listrik/Panas Bumi
3	PT. Nusantara IV	Sungai Kunyit/ Sangir Balai Janggo	Industri Niaga
4	PT. Kencana Sawit Indonesia	Sungai Kunyit/ Sangir Balai Janggo	Industri Niaga
5	PT. Bina Pratama Sakato	Jl. Diponegoro No.7 Kota Padang	Industri Niaga
6	PT. Pecconia Baru	Lubuk Gadang Barat Daya Kec.	Industri Niaga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

		Sangir	
7	PT. Sumatera Jaya Argo Lestari	JL. Diponegoro No.7 Kota Padang	Industri Niaga
8	Miftah	Bukit Malintang Barat Kec. Sangir	Air Minum Dalam Kemasan
9	PT. Mitra Kerinci	Sangir	Industri Niaga
DHARMASRAYA			
1	PT. Binapratama Sakato Jaya	Nagari Gunung Selasih, Kecamatan Pulau Punjung	Industri Niaga
2	PT. Selago Makmur Plantation	Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar	Industri Niaga
3	PT. Incasi Raya	Nagari Sinamar, Kecamatan Asam Jujuhan	Industri Niaga
4	PT. Tidar Kerinci Agung	Nagari Lubuk Besar, Kecamatan Asam Jujuhan	Industri Niaga
5	PT. Transco Pratama	Nagari Koto Baru, Kec. Koto Baru	Industri Niaga
6	PT. Sumbar Andalas Kencana	Nagari Muaro Sopan, Kec. Padang Laweh	Industri Niaga
7	PT. Dharmasraya Lestarindo	Nagari Koto Padang, Kec. Koto Baru	Industri Niaga
PASAMAN BARAT			
1	PDAM Tirta Gemilang	Jl. Mahoni Kec. Pasaman	BUMD
2	PT. Agrowiratama	Sungai Aua Kec Sungai Aua Kab Pasaman Barat	Industri Niaga
3	PT. Gersindo Minang Plantation	Desa Tanjung Pangka Kec Pasaman	Industri Niaga
4	PT. Bintara Tani Nusantara	Desa Air Runding Nag Ujung Gading	Industri Niaga
5	PT. Pasaman Marama Sejahtera	Desa Sontang Nag Sungai Aua Kab Pasbar	Industri Niaga
6	PT. Berkas Sawit Sejahtera	Jl. Lintas Raya Simp. Empat Kec Gunung Tuleh	Industri Niaga
7	PT. Usaha Sawit Mandiri	Jr. Simpang Kec Koto Balingka Kab Pasaman Barat	Industri Niaga
8	PT. Bakrie Pasaman Plantation	Jr. Sungai Aua Kec Sei Aua Kab Pasaman Barat	Industri Niaga
9	PT. Andalas Argo Industri	Air Rau Jorong Enam Koto Selatan Kec Kinali	Industri Niaga
10	PT. Sari Buah Sawit	Kinali Kec. Kinali Kab Pasaman Barat	Industri Niaga
11	PT. Gunung Sawit Abadi	Jr. Bancah Rambai Kec Kinali Kab Pasaman Barat	Industri Niaga
12	PT. Sawita Pasaman Jaya	Air Runding Kec. Koto Balingka	Industri Niaga

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

13	PT. Rimbo Panjang Sumber Makmur	Rimbo Panjang Kec. Kinali Kab Pasaman Barat	Industri Niaga
14	PT. Agro Wira Ligatsa	Simp 3 Alin Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman Barat	Industri Niaga
15	PT. PTPN IV Ophir	Jr. Ophir Nag. Koto Baru Kec Lhk Nan Duo	Industri Niaga
KABUPATEN SOLOK			
1	PDAM Kabupaten Solok	Jl. Raya Koto Baru Kec. Kubung	BUMD
2	PT. Perkebunan Nusantara VI (Persero)	Kayu Jao Kab. Solok	Perkebunan Teh
3	Syafrizal Ben (CV. Ridha Motor)	Kayu Jao Kab. Solok	Pencucian Motor
4	TASMAN (RM Semoga Jaya)	Lubuk Silasih Kab. Solok	Rumah Makan
5	CV. Bintang Mandiri	Kayu Jao Kab. Solok	Pengisian Air Bersih
6	CV. Kayu Aro Putra Mandiri	Jl. Lintas Padang-Solok KM 23 Kayu Aro	Pengisian Air Bersih
7	Aqita	Koto Gaek Guguk Kec. Gunung Talang	Pengisian Air Bersih
8	CV. Dequa Bening	Dusun I Jorong Kayu Aro Kec. Gunung Talang	Pengisian Air Bersih
9	PT. Mitra Aro Persada	Jl. Raya Solok-Padang KM. 23 Kayu Aro	Pengisian Air Bersih
10	CV. Elmas Sentosa Abadi A	Dusun V Jorong Kayu Aro Kec Gunung Talang	Industri Niaga
11	CV. Elmas Sentosa Abadi B	Dusun V Jorong Kayu Aro Kec Gunung Talang	Industri Niaga
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA			
1	PDAM Kab. Limapuluh Kota	Sarilamak. Harau	BUMD
2	PTP VI Pangkalan	Lubuk Ameh Gunung Malintang Kec. Pangkalan Koto Baru	Industri Karet
3	Pabrik Kertas Telur Sandra Thomi (CV. Sandra)	Jorong Ketinggian	Industri Niaga

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 2024

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas dapat dilihat bahwa Bapenda Provinsi Sumatera Barat memiliki 153 perusahaan yang menjadi wajib pajak air permukaan dengan jenis usaha yang berbeda-beda dan tersebar di berbagai daerah provinsi Sumatera Barat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kenyataannya proses pemungutan pajak air permukaan di Bapenda Provinsi Sumatera Barat tidak selalu berjalan dengan baik. Dikarenakan kurangnya kesadaran dan pemahaman wajib pajak atau perusahaan dalam kedisiplinan terkait membayar Pajak Air Permukaan. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami proses pemungutan Pajak Air Permukaan.

Uraian di atas menjadi dasar penulis dalam melaksanakan penelitian tentang Pajak Air Permukaan yang berjudul **“MEKANISME PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis mencoba menguraikan permasalahan yang dapat di angkat dalam penelitian ini. Adapun permasalahan tersebut adalah “Bagaimana mekanisme pemungutan pajak air permukaan yang di atur oleh badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat?”.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini bertujuan “Untuk mengetahui Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Penulis

Proses penelitian akan memberikan penulis pemahaman mendalam tentang kompleksitas Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pengumpulan data, analisis statistik, dan penyusunan rekomendasi akan mengembangkan keterampilan dan penulisan penulis.

2. Bagi Instansi

Dengan melakukan penelitian yang bermanfaat dan menghasilkan perbaikan yang nyata dalam sistem pajak, instansi tersebut dapat meningkatkan reputasi mereka di mata masyarakat dan lembaga lainnya. Hal ini dapat membantu dalam mendapatkan dukungan untuk inisiatif-inisiatif masa depan dan meningkatkan citra pemerintah daerah secara keseluruhan.

3. Bagi pembaca

Penelitian ini akan memberikan pembaca pemahaman yang lebih baik tentang mekanisme pemungutan pajak air permukaan dan bagaimana sistem tersebut beroperasi di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Hal ini dapat membantu pembaca memahami kompleksitas peraturan perpajakan dan dampaknya bagi masyarakat.



1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Jl. Khatib Sulaiman No. 43, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25173.

b. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2024

1.5.2 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan rancangan penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam melakukan proses penelitian, penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif, desain penelitian bertujuan memberi pegangan yang jelas dan tersrtuktur kepada peneliti dalam melakukan penelitian (Karlina. B, 2015)

1.5.3 Jenis Data

a. Data primer

Data primer yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti langsung dari lapangan. Untuk memperoleh data primer maka penulis langsung datang ke sumbernya atau diperoleh dengan menggunakan metode wawancara (Indrasari Y, 2020).

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri pengumpulannya oleh peneliti, dan data sekunder biasanya terwujud



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data dokumentasi berupa data yang diperoleh dari sumber tidak langsung seperti majalah, keterangan-keterangan, atau publikasi lainnya (Indrasari Y, 2020).

1.5.4 Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan antara dua orang yang berhadapan untuk bertukar ide dan informasi dengan proses tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu (Sugiyono, 2020).

b. Observasi

Observasi adalah kegiatan peneliti terlibat langsung aktivitas sehari-hari orang yang sedang diamati untuk digunakan sebagai sumber data penelitian (Sugiyono, 2020).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu berbentuk gambar, tulisan, atau karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2020).

d. Studi pustaka

Studi pustaka atau *liberature review* adalah bagian dari sebuah karya tulis ilmiah yang memuat pembahasan-pembahasan penelitian terdahulu dan referensi ilmiah yang terkait dengan penelitian yang dijelaskan oleh penulis dalam karya ilmiah tersebut (Hermawan I, 2019).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1.5.5 Analisis Data

Penulis menganalisis data dengan menggunakan penjelasan bersifat kualitatif berbentuk deskriptif dan data tidak berupa angka, karena penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi yang mendalam tentang subjek yang diteliti serta mengungkapkan suatu fakta maupun peristiwa yang memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan atau permasalahan yang di hadapi.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari 4 bab, dengan uraian sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, analisis data, dan sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan deskripsi atau gambaran umum Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, sejarah singkat, struktur organisasi instansi, uraian tugas, visi dan misi yang ada di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Bab ini berisikan tentang uraian teori yang mendukung penulisan penelitian ini, disini akan dibahas mengenai telaah pustaka yang berkaitan dengan judul penelitian.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan penulis.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Sejarah Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sumatera Barat maka terbentuklah dinas pengelolaan keuangan daerah provinsi sumatera barat yang merupakan penggabungan dari tiga institusi yaitu Biro Keuangan Sekretariat Daerah Povinsi Sumatera Barat, Biro Perlengkapan Sektretariat Provinsi Sumatera Barat, dan Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat (<https://bapenda.sumbarprov.go.id>).

Selanjutnya tahun 2011 terjadi perubahan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat. Mengingat begitu peliknya permasalahan aset yang merupakan bagian dari dinas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat menjadi biro pengelolaan aset daerah, dan sesuai dengan peraturan daerah Provinsi Sumatera Barat nomor 12 tahun 2011 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 4 tahun 2008, tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah Provinsi Sumatera Barat.

Struktur organisasi dinas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat berubah dengan susunan organisasi terdiri dari kepala dinas, 1 sekretariat dan 7 bidang di antaranya, bidang pajak daerah, bidang retribusi bagi hasil dan pendapatan lain-lain, bidang anggaran, bidang akuntansi. bidang bina anggaran daerah bawahan, bidang kuasa BUD, bidang sistem informasi serta UPT kelompok jabatan fungsional.



Kemudian pada tahun 2016 lahir peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana dinas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat berubah fungsi menjadi Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tipe A, dengan melaksanakan fungsi penunjang keuangan, sedangkan Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK) badan keuangan daerah dibentuk berdasarkan peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 79 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi serta tata kerja badan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat (<https://bapenda.sumbarprov.go.id>).

Susunan organisasi terdiri dari Kepala badan, 1 sekretariat dan 7 bidang diantaranya, bidang pajak daerah, bidang retribusi dana perimbangan pendapatan lain-lain, bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan pelaporan, bidang bina administrasi keuangan daerah. Sementara UPT dan kelompok jabatan fungsional dicantumkan dalam peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 45 tahun 2017 tentang uraian tugas pokok dan fungsi badan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat.

Terjadi perubahan strukur kembali dengan berubahnya peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 menjadi peraturan daerah nomor 13 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Sumatera Barat, dimana Badan keuangan daerah Provinsi Sumatera Barat berubah menjadi 2 badan tipe B yang terdiri dari Badan pengelolaan aset daerah, disini terjadi penggabungan dan penciutan kembali biro administrasi pengadaan dan pengelolaan barang milik daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menjadi bidang pengelolaan barang milik daerah, dan badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat.

SOTK badan dibentuk berdasarkan peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 11 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja badan daerah dan SOTK UPTD dibentuk berdasarkan peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 88 tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pendapatan Provinsi Sumatera Barat (<https://bapenda.sumbarprov.go.id>).

2.2 Struktur Organisasi Kantor Bapenda Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 91 tahun 2020 menyebutkan tentang susunan struktur unit kerja Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Kepala badan
2. Sekretariat
3. Sub Bagian Umum
4. Sub Bagian Keuangan dan Program
5. Bidang Pajak Daerah
6. Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
7. Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya
8. Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah
9. Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain
10. Sub Bidang Retribusi Daerah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11. Sub Bidang Bagi Hasil Pajak
12. Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain
13. Bidang Pembinaan dan Pengendalian
14. Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian
15. Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan
16. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

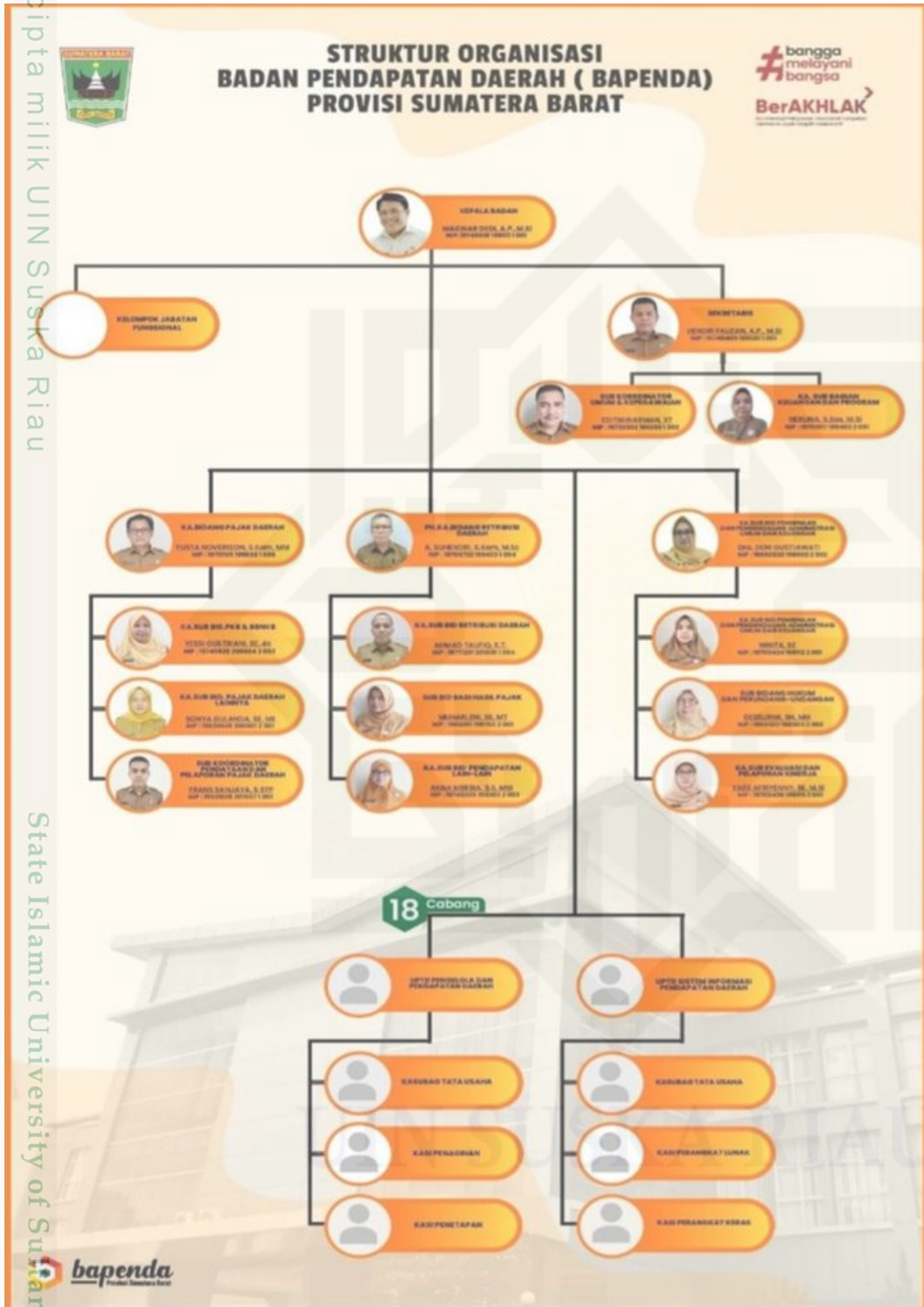
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat



Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.3 Uraian Tugas Bagian Unit Kerja BAPENDA Provinsi Sumatera Barat

Berdasarkan peraturan gubernur Sumatera Barat nomor 11 tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi dan fungsi pegawai serta uraian tugas bagian unit kerja badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat, berikut adalah tugas pokok pada masing-masing bagian pada kantor badan pendapatan daerah Provinsi Sumatera Barat.

2.3.1 Kepala Badan

- a. Menyelenggarakan tindak lanjut hasil pemeriksaan lingkup badan
- b. Memimpin seluruh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi badan
- c. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pemimpin
- d. Menyelenggarakan koordinasi bidang pengelolaan pendapatan daerah
- e. Menyelenggarakan monitoring bidang pendapatan

2.3.2 Sekretariat

- a. Melaksanakan koordinasi dengan bidang-bidang UPTD
- b. Melaksanakan pengkajian program kerja sekretariat dan badan
- c. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi, pelaporan keuangan serta pengelolaan aset badan
- d. Melaksanakan fasilitas pelayanan informasi publik
- e. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan lingkup sekretariat

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di bidang umum dan kepegawaian
- b. Menyiapkan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi
- c. Menyiapkan bahan kerjasama dan kehumasan
- d. Menyiapkan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan badan
- e. Menyiapkan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset

2.3.4 Sub Bagian Keuangan dan Program

- a. Menyiapkan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ke tata laksanaan
- b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang keuangan dan program
- c. Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan dan program di lingkungan badan
- d. Merencanakan dan menyiapkan bahan perjanjian kinerja dan SOP urusan penyusunan program dan keuangan
- e. Menyiapkan bahan penyusunan pembukaan keuangan dan perhitungan anggaran dan verifikasi pengelolaan keuangan

2.3.5 Bidang Pajak Daerah

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Melaksanakan sosialisasi dan publikasi inovasi pelayanan publik terkait pemungutan dan pelayanan pajak daerah
- c. Melaksanakan pendataan pajak daerah, pengelolaan data dan pelaporan pajak daerah
- d. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah dengan unit kerja terkait
- e. Mengkoordinasikan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pemungutan dan pelayanan pajak daerah

2.3.6 Sub Bidang Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama

Kendaraan Bermotor

- a. Mempunyai tugas pokok melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- b. Menyiapkan bahan perumusan usulan penetapan tarif pungutan pajak kendaraan bermotor serta bahan perumusan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- c. Menyiapkan bahan penetapan nilai jual kendaraan bermotor (NJKB)
- d. Menyiapkan bahan usulan produk hukum pengenaan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor
- e. Menyiapkan bahan data dan kajian untuk mendukung penyusunan target kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.3.7 Sub Bidang Pajak Daerah Lainnya

- a. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, perencanaan di bidang pajak daerah lainnya
- b. Menyiapkan bahan kebijakan teknis di bidang pajak daerah lainnya yang meliputi pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan
- c. Menginventarisasi subjek dan objek pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan
- d. Melakukan verifikasi dokumen penerimaan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan pajak air permukaan
- e. Menyiapkan bahan usulan dan kajian penetapan target penerimaan pajak bahan bakar dan pajak air permukaan

2.3.8 Sub Bidang Pendataan dan Pelaporan Pajak Daerah

- a. Menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan dan pelaporan pajak daerah
- b. Menyiapkan data pembukaan dan pelaporan tunggakan pajak daerah serta piutang pajak daerah
- c. Menyiapkan bahan pertimbangan atas keberatan pajak dan restitusi daerah
- d. Melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data penerimaan pajak daerah dengan UPTD dan instansi terkait
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pendataan dan pelaporan pajak daerah

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.3.9 Bidang Retribusi dan Pendapatan Lain-Lain

- a. Mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain
- b. Melaksanakan kegiatan fasilitas, sosialisasi, monitoring serta klasifikasi data penerimaan retribusi daerah, bagi hasil serta pendapatan lain-lain
- c. Melaksanakan koordinasi, evaluasi dan rekonsiliasi penerimaan retribusi daerah, bagi hasil pajak serta pendapatan lain-lain
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang retribusi daerah, bagi hasil pajak dan pendapatan lain-lain
- e. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kebijakan penerimaan bagi hasil pajak

2.3.10 Sub Bidang Retribusi Daerah

- a. Menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis penerimaan retribusi daerah
- b. Menyiapkan bahan usulan produk hukum pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah
- c. Menyiapkan bahan perumusan penetapan dan perubahan tarif retribusi daerah
- d. Menyiapkan bahan penyusunan konsep petunjuk pelaksanaan serta teknis pemungutan dan pengelolaan retribusi daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dan milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan, fasilitasi, sosialisasi, monitoring dan klarifikasi data penerimaan retribusi daerah

2.3.11 Sub Bidang Bagi Hasil Pajak

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bagi hasil pajak yang berasal dari pemerintah pusat
- b. Menyiapkan bahan data analisis terhadap alokasi penerimaan bagi hasil pajak
- c. Menyiapkan pelaporan realisasi dan evaluasi terhadap penerimaan bagi hasil pajak
- d. Menyiapkan bahan laporan realisasi dan evaluasi terhadap penerimaan bagi hasil pajak
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang bagi hasil pajak

2.3.12 Sub Bidang Pendapatan Lain-Lain

- a. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang pendapatan lain-lain
- b. Menyiapkan bahan penyusunan konsep peraturan-peraturan pelaksanaan, dan hasil pelaksanaan dan petunjuk teknis penerimaan dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait dengan penerimaan dari dana transfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID)
- d. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pendapatan lain-lain
- e. Menyiapkan bahan analisis penyusunan potensi dan rencana penerimaan dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dan lain-lain pendapatan daerah

2.3.13 Bidang Pembinaan dan Pengendalian

- a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, koordinasi dan pembinaan serta pengendalian internal di bidang administrasi umum dan keuangan, hukum dan perundangan-undangan serta evaluasi dan pelaporan kinerja
- b. Melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah
- c. Melaksanakan evaluasi kinerja
- d. Menyusun laporan hasil pengendalian dan evaluasi kinerja
- e. Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pembinaan dan pengendalian



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2.3.14 Sub Bidang Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Umum dan Keuangan

- a. Menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan dan pengendalian administrasi umum dan keuangan terkait operasional pemungutan pajak daerah
- b. Melaksanakan koordinasi dengan pengawas internal dan eksternal
- c. Melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan internal dan eksternal
- d. Melaksanakan tindak lanjut pengaduan masyarakat terkait pelayanan pajak
- e. Menyiapkan bahan penyusunan laporan hasil pembinaan dan pengendalian administrasi umum

2.3.15 Sub Bidang Hukum dan Perundang-Undangan

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian hukum dan perundang-undangan
- b. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi standar operasional prosedur pajak dan retribusi daerah
- c. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hukum dan perundang-undangan
- d. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian hukum dan perundang-undangan
- e. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi standar operasional prosedur pajak dan retribusi daerah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2.3.16 Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja

- a. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengendalian di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja
- b. Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan dan pengendalian di bidang evaluasi pelaporan kinerja
- c. Melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal
- d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang evaluasi dan pelaporan kinerja
- e. Menyiapkan dokumen laporan kinerja berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) badan

2.4 Visi dan Misi Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat

Adapun visi, misi dari Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- a. Visi
 Terwujudnya Sumatera Barat Madani Yang Unggul Dan Berkelanjutan.
- b. Misi
 1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil, dan berdaya asing
 2. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan filsafah “*Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.*”

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Meningkatkan nilai tambah produktivitas pertanian, peternakan, perkebunan
4. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/menengah serta ekonomi berbasis komputer
5. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan
6. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
7. Meningkatkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih akuntabel dan berkualitas

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pemungutan Pajak Air Permukaan Bapenda Provinsi Sumatera Barat menjalankan tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Air Permukaan, agar pemungutan pajak air permukaan ini berjalan dengan optimal.

Seperti yang dijelaskan dalam hasil wawancara peneliti dengan narasumber, masih banyak yang menjadi kendala dalam memungut Pajak Air Permukaan pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat sehingga pemungutan pajak air permukaan belum tercapai secara optimal. Selain itu dapat diukur dan ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mengenai Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat, diawali dengan Wajib pajak harus melaporkan jumlah pemakaian air atau produksi kwh kepada staff bidang Pajak Daerah melalui surat pemberitahuan pajak daerah (SPTPD).
2. Staff bidang pajak daerah membuat surat ketetapan pajak daerah (SKPD) berdasarkan jumlah pajak terutang pada nota perhitungan.
3. Proses penetapan ini menegaskan bahwa jumlah pajak yang tercantum dalam SKPD adalah jumlah yang harus dibayar oleh subjek pajak.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Setelah itu, staff pajak daerah menyampaikan SKPD ke wajib pajak, disertai dengan STPD, bukti transfer, pembayaran, dan rekapan pembayaran pajak air permukaan.
5. Jika pajak terutang berdasarkan SKPD tidak dilunasi setelah satu bulan, akan ditagih menggunakan STPD dengan sanksi administrasi sebesar 2% sebulan maksimal 15 bulan.

4.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yang mungkin bisa menjadi masukan bagi Bapenda Provinsi Sumatera Barat dan Wajib Pajak/Perusahaan Air Permukaan :

- a. Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat diharapkan untuk terus mempertahankan serta meningkatkan Upaya Pemungutan Pajak Air Permukaan sehingga penerimaan Pajak setiap bulannya dapat berjalan dengan optimal
- b. Bagi wajib pajak/perusahaan yang sudah terdaftar maupun belum terdaftar untuk lebih meningkatkan kesadaran dalam membayar pajak demi membantu pemerintah dalam Pembangunan daerah yang lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an : QS. Al-Baqarah : 164. QS. Al-Hajj : 5. QS. Al-Anfal : 11 QS.
Al-Anbiya` : 30

Sumber Berdasarkan Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah dan Pemerintahan Daerah

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah

Undang-Undang nomor 1 tahun 2022, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah

Sumber Berdasarkan Website :

<https://www.google.com/url?q=https://bapenda.sumbarprov.go.id/&sa=U&sqi=&>

Sumber Berdasarkan Buku Dan Jurnal :

Bulutoding, L. (2022). *Konsep Pajak Menurut Islam VS Umum* (No. jeha4).
Center for Open Science.

Falah, M. (2022). Fresh Ijtihad Muhammadiyah Tentang Sumber Daya Air Dalam
Kajian Politik Islam: Fresh Ijtihad Muhammadiyah Tentang Sumber Daya
Air Dalam Kajian Politik Islam. *Jurnal Staika: Jurnal Penelitian dan
Pendidikan*, 5(1), 13-26.

FITRIA, W. C. (2023). *Mekanisme Transfer Antar Bank Melalui Jasa Kliring
Pada Pt. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten, Tbk.
Kantor Cabang Tasikmalaya* (Doctoral dissertation, Universitas
Siliwangi).

Hermawan, I., & Pd, M. (2019). *Metodologi penelitian pendidikan (kualitatif,
kuantitatif dan mixed method)*. Hidayatul Quran.

Indrasari, Y. (2020). *Efisiensi Saluran Distribusi Pemasaran Kopi Rakyat Di
Desa Gending Waluh Kecamatansempol (Ijen) Bondowoso*. *Jurnal
Manajemen Pemasaran*, 14(1), 44-50.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Karlina, B. (2015). *Pengaruh Manajemen Fasilitas Terhadap Mutu Layanan Diklat Di Pusat Pengembangan Dan Pemberdayaan Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin Dan Teknik Industri (PPPPTK BMTI) BANDUNG* (Doctoral dissertation, Universitas Pendidikan Indonesia).
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru 2019*. Yogyakarta : CV Andi Offset
- Ramadhan, A. S., & Nasution, J. (2022). Efektivitas Pemungutan Pajak Air Permukaan Di Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara. *Jaakfe Untan (Jurnal Audit dan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura)*, 11(1), 01-10.
- Resmi, Siti. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus. Edisi 8*. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat
- Simbolon, Y. Y., Siagian, S. Z., Simanjuntak, R. T., Hasibuan, M., & Ivanna, J. (2023). *Perilaku Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa di Dusun IV Melati Desa Laut Dendang Kec. Percut Sei Tuan*. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(3), 26588-26596.
- Sutedi, A. (2022). *Hukum pajak*. Sinar Grafika.
- SINAGA, H. (2023). *Mekanisme Pelaporan SPT Tahunan Badan Menggunakan E-form Pada Kantor Konsultan Pajak Daniel Tarigan SE*.
- Siahaan, Marihot P. (2010). *Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo persada
- Siahaan, Marihot Pahala (2013). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Sumarsan, Thomas. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT. Indeks
- Zesa, R. (2023). *Tata Cara Pemungutan Pajak Air Permukaan (Pap) Pada Uptd Wilayah 1 Bapenda Provinsi Lampung*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apa saja komponen yang menjadi dasar dalam menentukan besarnya Pajak Air Permukaan ?
3. Bagaimana pengawasan yang dilakukan terhadap pemungutan Pajak Air Permukaan ini untuk memastikan kepatuhan wajib pajaknya ?
4. Pergub yang mendasari tentang Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat ?
5. Bagaimana alur pendaftaran Pajak Air Permukaan Pada Bapenda Provinsi Sumatera Barat ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-6778/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/11/2023 Pekanbaru, 22 November 2023 M
Sifat : Biasa 9 Jumadil Awwal 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Tugas Akhir**

Kepada
Yth. Fatimah Zuhra, S.Si, M. Stat
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

N a m a : Hestika Putri
N I M : 02170624135
J u r u s a n : D-III Perpajakan
S e m e s t e r : V (Lima)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/menyusun laporan penelitian dengan judul: **"Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat"**.

Sehubungan dengan itu, kami menunjuk saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan laporan penelitian mahasiswa tersebut di atas.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.



an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,

Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl.H.R.Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan-Pekanbaru 28293 PO Box
 1400Telp. 0761-562051 Fax 0761-562052
 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail.: fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-7283/Un.04/F.VII/PP.00.9/12/2023 Pekanbaru, 3 Mei 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran :
 Hal : Izin Penelitian

Kepada
 Yth Kepala Badan
 Pendapatan Daerah
 Provinsi Sumatra Barat
 di Tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, atas nama :

Nama : Hestika Putri
 NIM. : 02170624135
 Jurusan : D-III Perpajakan
 Semester : V (Lima)

bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka menyelesaikan laporan penelitian dengan judul: **"Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat"** pada bulan mei 2024 . Untuk itu kami mohon kiranya Saudara brkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Dr.Mahyanti, SE, MME ,MMP
 NIP. 19700826 199903 2001

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merightskan pengutipan yang bersifat komersial meskipun sebagian kecilnya merupakan kutipan.
 UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau
 UIN Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jln. Khatib Sulaiman No. 43 Telp. (0751) 448596 Fax. (0751) 7054522 Padang

Padang, 14 Mei 2024
Dzulq'adah 1445 H

Nomor : 423/ 414 / Sekrt-BAPENDA/2024
Sifat : Biasa
Lampiran: -
Perihal : **Rekomendasi Penelitian**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

di
Tempat

Berdasarkan surat Nomor B-7283/UN.04/F.VII/PP.00.9/2024 tanggal 03 Mei 2024 tentang Permohonan Izin Penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk mahasiswa berikut ini :

Nama : **Hestika Putri**
NIM : 02170624135
Jurusan : D-III Perpajakan
Judul Penelitian : "Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menerima Mahasiswa tersebut melaksanakan penelitian pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat selama bulan Mei 2024, dengan mengikuti semua ketentuan yang berlaku pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat. Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bapenda Provinsi Sumatera Barat
3. Yang bersangkutan
4. Arsip



BIOGRAFI PENULIS



Hestika Putri lahir di Lareh Nan Panjang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat. Pada tanggal 06 November 2002. Anak ke tiga dari pasangan Ayah Zaldi Arman dan Ibu Nurlinas. Pendidikan yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SDN 01 Sitanang pada Tahun (2009-2015). Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan di MTsN 04 Lima Puluh Kota Pada Tahun (2015-2018) dan penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Lareh Sago Halaban pada tahun (2018-2021). Selanjutnya penulis meneruskan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dengan mengambil jurusan D-III Administrasi Perpajakan.

Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat dari bulan Juli sampai Agustus 2023. Untuk menyelesaikan Pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maka penulis mengajukan Tugas Akhir dengan judul **“Mekanisme Pemungutan Pajak Air Permukaan Pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Barat.”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu mass
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.